



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Nomor : 2372/KPTUN.W2.TUN1/PW1.1.1/VI/2026 Jakarta, 09 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Bulanan
Bulan Mei 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Di –
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bersama ini kami sampaikan berkas laporan bulanan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk periode Mei 2026.

Berkas laporan ini sebagai bahan evaluasi dan monitoring guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa. Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



Tembusan :
1. Arsip





**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**



LAPORAN BULANAN MEI

2026

(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id

**Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	17
BAB III. TELAAHAN	26
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	27



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Februari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum



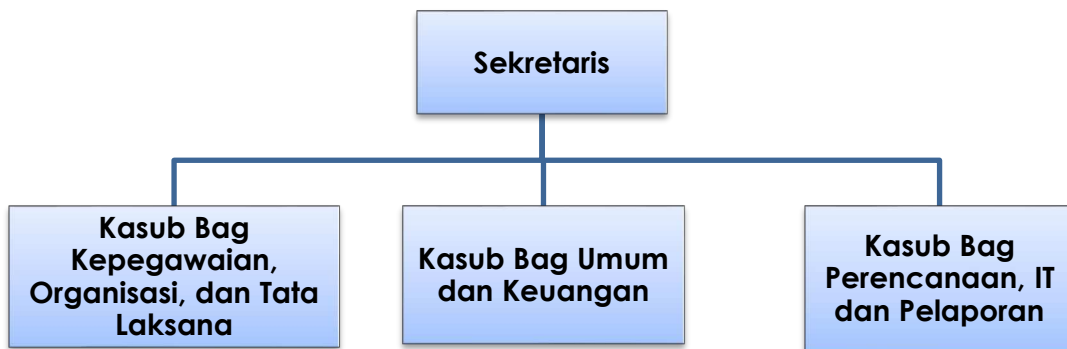
BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

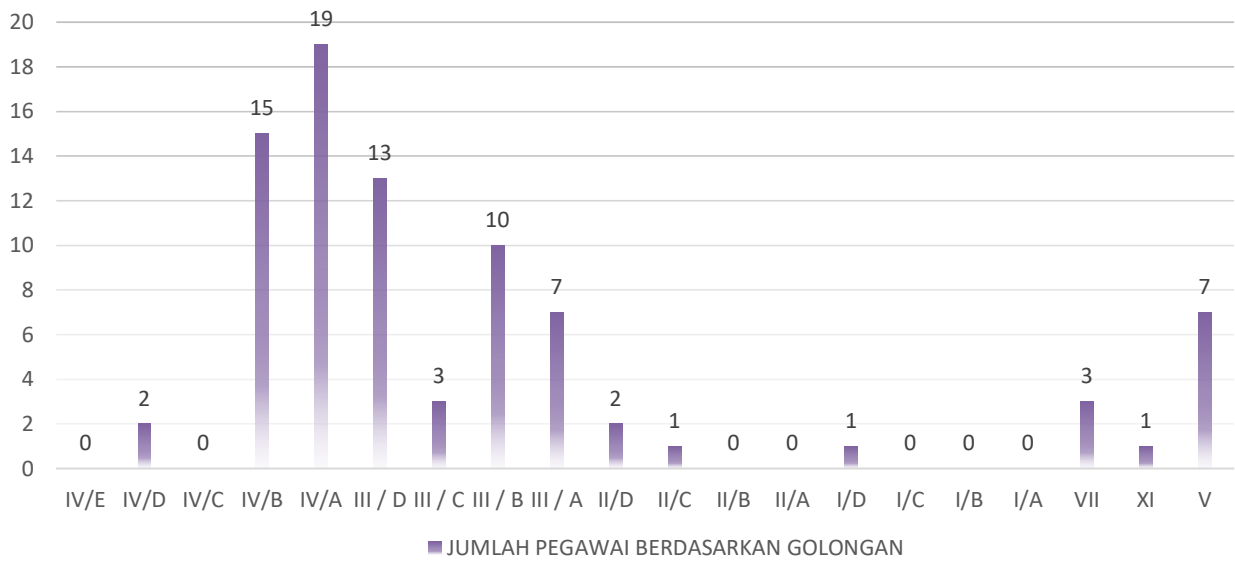
a. Jumlah Pegawai

Jumlah Seluruh Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2026 adalah 69 orang PNS, 4 orang CPNS, 11 orang PPPK, yang terdiri dari Laki – Laki yang berjumlah 55 orang dan perempuan 29 orang, adapun rincian sebagai berikut:



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.				
2.				

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET

PELANTIKAN / PENGANGKATAN JABATAN BARU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET

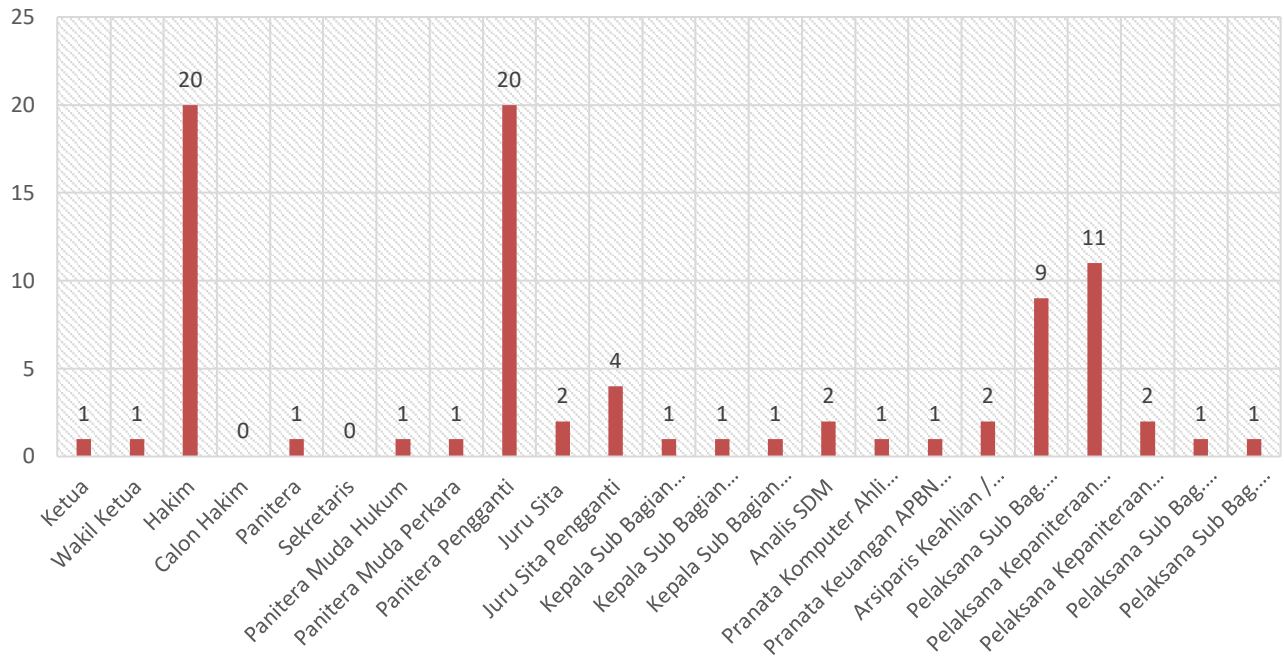
PENSIUN

NO	NAMA	JABATAN	KET



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

No.	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK			RAHASIA	JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING		
1	PERSURATAN	MAHKAMAH AGUNG RI	9	-	-	9
2		PTTUN JAKARTA	4	-	-	4
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	1	-	-	1
4		DIRJEND. BADIMIL TUN	5	-	-	5
5		KOMISI YUDISIAL	1	-	0	1
6		PERKARA / LAIN-LAIN	109	-	-	109
7		UMUM / LAIN-LAIN	23	-	-	23
TOTAL						152

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub Bagian Kepegawaian dan Otala	75	0	0	75
2	Sub Bagian Umum dan Keuangan	26	0	0	26
3	Sub Perencanaa IT, Pelaporan	2	0	0	2
4	Kepaniteraan Muda Perkara	143	0	0	143
5	Kepaniteraan Muda Hukum	23	0	0	23
6	Lain - Lain	0	0	0	0
TOTAL					269

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan Mei Tahun 2026 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filing Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
Total		1626	20	205	1851



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Mei 2026 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	40,512,837,000	0	18,932,150,687	4,591,145,870	23,523,296,557	58.06 %	16,989,540,443
WAProgram Dukungan Manajemen	40,512,837,000	0	18,932,150,687	4,591,145,870	23,523,296,557	58.06 %	16,989,540,443
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
053 Pengadaan peralatan kasellitas perkantoran	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
053.0A Pengadaan Meubelair	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
332111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000001. Pengadaan Meja dan Kursi CPNS	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
WA.0990 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	40,492,837,000	0	18,932,150,687	4,591,145,870	23,523,296,557	58.09 %	16,989,540,443
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	40,492,837,000	0	18,932,014,687	4,591,130,870	23,523,145,557	58.09 %	16,989,391,443
EBA.962 Layanan Umum	1,440,000	0	700,000	700,000	1,400,000	97.22 %	40,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,440,000	0	700,000	700,000	1,400,000	97.22 %	40,000
005.0A Layanan Sarana Dan Prasarana Internal Ekstrakomptabel	1,440,000	0	700,000	700,000	1,400,000	97.22 %	40,000
321252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0	700,000	700,000	1,400,000	97.22 %	40,000
000097. Printer	1,440,000	0	700,000	700,000	1,400,000	97.22 %	40,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	40,491,397,000	0	18,931,314,687	4,590,430,870	23,521,745,557	58.09 %	16,989,351,443
001 Gaji dan Tunjangan	35,293,269,000	0	16,517,530,697	4,376,269,083	20,893,799,780	59.20 %	14,399,469,220
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	35,293,269,000	0	16,517,530,697	4,376,269,083	20,893,799,780	59.20 %	14,399,469,220
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4,373,990,000	0	1,853,091,200	611,505,500	2,464,596,700	56.35 %	1,909,393,300
000002. Belanja Gaji Pokok PNS	423,548,000	0	1,240,340,300	0	1,240,340,300	292.85	-816,792,300
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	2,000	0	307,289,300	0	307,289,300	15,364.	-307,287,300
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	323,873,000	0	0	0	0	0.00 %	323,873,000
000102. Belanja Gaji Pokok PNS (BA BUN)	3,626,567,000	0	305,461,000	611,505,500	916,967,100	25.28 %	2,709,599,900
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	60,000	0	21,778	7,098	28,876	48.13 %	31,124
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	0	18,142	3,674	21,816	43.03 %	28,184

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	5,000	0	0	3,424	3,424	68.48 %	1,576
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5,000	0	3,636	0	3,636	72.72 %	1,364
511121 Belanja Tunj. Suamistri PNS	367,456,000	0	142,313,298	46,614,086	188,927,384	51.41 %	178,538,616
000008. Belanja Tunjangan Suamistri PNS	314,964,000	0	118,692,610	23,323,628	142,016,238	45.09 %	172,947,762
000009. Belanja Tunjangan Suamistri PNS (Gaji ke 13)	26,247,000	0	0	23,290,458	23,290,458	88.74 %	2,956,542
000010. Belanja Tunjangan Suamistri PNS (Gaji ke 14)	26,247,000	0	23,620,698	0	23,620,698	89.99 %	2,626,312
511122. Belanja Tunj. Anak PNS	118,370,000	0	47,861,396	15,844,704	63,706,100	53.82 %	54,663,900
000011. Belanja Tunjangan Anak PNS	101,460,000	0	39,937,440	7,928,980	47,866,426	47.18 %	53,593,574
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8,455,000	0	0	7,915,718	7,915,718	93.62 %	539,282
000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8,455,000	0	7,923,956	0	7,923,956	93.72 %	531,044
511123. Belanja Tunj. Struktural PNS	43,200,000	0	13,500,000	3,240,000	16,740,000	38.75 %	26,460,000
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	37,440,000	0	10,620,000	1,620,000	12,240,000	32.69 %	25,200,000
000015. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2,880,000	0	0	1,620,000	1,620,000	56.25 %	1,260,000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
511124. Belanja Tunj. Fungsional PNS	190,337,000	0	80,035,000	27,536,000	107,571,000	56.52 %	82,766,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS	163,200,000	0	66,645,000	14,146,000	80,791,000	49.50 %	82,409,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13,600,000	0	0	13,390,000	13,390,000	98.46 %	210,000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13,337,000	0	13,390,000	0	13,390,000	98.91 %	147,000
511125. Belanja Tunj. PPh PNS	140,000,000	0	10,904,557	11,122,195	22,026,752	15.73 %	117,973,248
000020. Belanja Tunj. PPh PNS	120,000,000	0	528,010	123,689	651,699	0.54 %	119,348,301
000021. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	10,000,000	0	0	10,998,506	10,998,506	109.99	-998,506
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	10,000,000	0	10,376,547	0	10,376,547	103.77	-376,547
511126. Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	98,056,680	31,864,800	129,921,480	50.45 %	127,603,520
000023. Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	98,056,680	31,864,800	129,921,480	50.45 %	127,603,520
511129. Belanja Uang Makan PNS	889,741,000	0	192,924,000	56,136,000	249,060,000	27.99 %	640,681,000
000024. Gol IV (29 org x 22 hr x 12 Bin)	308,965,000	0	96,350,000	29,397,000	125,747,000	40.70 %	183,218,000
000025. Gol III (60 org x 22 Hr x 12 Bin)	480,730,000	0	84,989,000	23,939,000	108,928,000	22.66 %	371,802,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000026. Gol II (10 org x 22 Hr x 12 Bln)	90,951,000	0	8,205,000	2,100,000	11,305,000	12.43 %	79,646,000
000027. Gol I (1 org x 22 Hr x 12 Bln)	9,095,000	0	2,380,000	700,000	3,080,000	33.86 %	6,015,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	73,654,000	0	16,930,000	5,520,000	22,450,000	30.48 %	51,204,000
000028. Belanja Tunjangan Umum PNS	63,845,000	0	14,170,000	2,760,000	16,930,000	26.52 %	46,915,000
000029. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	4,902,000	0	0	2,760,000	2,760,000	56.30 %	2,142,000
000030. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	4,907,000	0	2,760,000	0	2,760,000	56.25 %	2,147,000
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	5,459,313,000	0	2,858,452,778	767,383,278	3,625,836,056	66.42 %	1,833,476,944
000031. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,208,703,000	0	1,050,684,705	0	1,050,684,705	86.93 %	158,018,295
000032. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 13)	177,014,000	0	0	0	0	0.00 %	177,014,000
000033. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 14)	410,000,000	0	471,166,056	0	471,166,056	114.82 %	-61,166,056
000103. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara (BA BUN)	3,063,596,000	0	1,336,601,357	767,383,278	2,103,984,635	57.43 %	1,059,611,365
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	23,225,500,000	0	10,983,900,000	2,729,600,000	13,713,500,000	59.05 %	9,512,000,000
000034. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	8,394,845,000	0	4,840,600,000	0	4,840,600,000	57.66 %	3,554,245,000
000035. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 13)	531,100,000	0	0	0	0	0.00 %	531,100,000
000036. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 14)	2,021,600,000	0	1,409,500,000	0	1,409,500,000	69.72 %	612,100,000
000104. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (BA BUN)	9,635,205,000	0	2,203,300,000	2,729,600,000	4,932,900,000	51.20 %	4,702,305,000
000105. Tunggalan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (BA BUN)	2,642,700,000	0	2,530,500,000	0	2,530,500,000	95.75 %	112,200,000
511011 Belanja Gaji Pokok PPPK	39,600,000	0	163,452,150	52,275,575	215,727,725	544.77 %	-176,127,725
000037. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,859,000	0	16,199,650	0	16,199,650	566.62 %	-13,340,650
000038. Belanja Gaji Pokok PPPK	33,882,000	0	147,252,500	29,450,500	176,703,000	521.52 %	-142,821,000
000039. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,859,000	0	0	22,825,075	22,825,075	798.36 %	-19,966,075
511019 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	5,039	1,641	6,680	95.43 %	320
000040. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	0	721	721	72.10 %	279
000041. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	439	0	439	43.90 %	561
000042. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	4,600	820	5,320	110.40 %	-320

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511021 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,704,000	0	7,478,295	2,379,450	9,857,751	266.14 %	-6,153,751
000043. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	264,000	0	0	1,019,766	1,019,766	386.28 %	-755,766
000044. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,176,000	0	6,798,450	1,359,690	8,158,140	256.87 %	-4,982,140
000045. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	264,000	0	679,845	0	679,845	257.52 %	-410,845
511022 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,456,000	0	1,733,996	551,725	2,285,721	156.99 %	-829,721
000046. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,250,000	0	1,576,360	315,272	1,891,632	151.33 %	-641,632
000047. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	103,000	0	0	236,453	236,453	229.57 %	-133,453
000048. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	103,000	0	157,636	0	157,636	153.04 %	-54,636
511024 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	2,100,000	700,000	2,800,000	57.14 %	2,100,000
000049. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	1,750,000	350,000	2,100,000	50.00 %	2,100,000
000050. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	0	350,000	350,000	100.00 %	0
000051. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
511025 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,044,000	0	8,799,030	2,806,275	11,605,305	286.98 %	-7,561,305
000052. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,466,000	0	7,966,200	1,593,240	9,559,440	275.81 %	-6,093,440
000053. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289,000	0	0	1,213,035	1,213,035	419.74 %	-924,035
000054. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289,000	0	832,830	0	832,830	288.18 %	-543,830
511028 Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	26,044,000	8,022,000	34,066,000	33.93 %	66,334,000
000055. Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	26,044,000	8,022,000	34,066,000	33.93 %	66,334,000
511033 Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	0	9,927,500	3,158,750	13,086,250	130.862 %	-13,076,250
000056. Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	0	9,927,500	3,158,750	13,086,250	130.862 %	-13,076,250
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,197,829,000	0	2,413,783,900	214,161,787	2,627,945,777	50.56 %	2,569,882,223
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1,023,646,000	0	1,407,814,412	12,778,541	1,420,592,953	87.49 %	203,053,047
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,543,646,000	0	1,380,509,449	11,180,141	1,391,689,590	90.16 %	151,956,410
000057. Petugas Kebersihan	654,576,000	0	654,576,000	0	654,576,000	100.00 %	0
000058. Satpam	720,096,000	0	720,096,000	0	720,096,000	100.00 %	0
000059. Tambahan Satpam (1 Orang x 8 Bulan)	55,392,000	0	2,768,400	0	2,768,400	5.00 %	52,623,600
000101. Air minum Kemasan / Gator	6,000,000	0	730,000	0	730,000	12.17 %	5,270,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000106. Retribusi Sampah	9,000,000	0	1,400,000	1,000,000	2,400,000	26.67 %	6,600,000
000109. Keperluan sehari-hari Perkantoran	43,190,000	0	939,049	10,180,141	11,119,190	25.74 %	32,070,810
000111. Pengemudi (1 Orang x 8 Bulan)	55,392,000	0	0	0	0	0.00 %	55,392,000
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,000,000	0	27,304,963	1,598,400	28,903,363	36.13 %	51,096,637
000060. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	80,000,000	0	27,304,963	1,598,400	28,903,363	36.13 %	51,096,637
002.06 LANGGANAN DAYA JASA	939,491,000	0	454,253,051	79,988,297	534,241,348	56.86 %	405,249,652
521111. Belanja Keperluan Perkantoran	194,000,000	0	182,795,589	330,301	183,125,890	94.39 %	10,874,110
000061. Langganan Internet	190,000,000	0	181,500,000	0	181,500,000	95.53 %	8,500,000
000062. Lisensi Video Conference	4,000,000	0	1,295,589	330,301	1,625,890	40.65 %	2,374,110
521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,200,000	0	1,699,500	39,000	1,738,500	41.39 %	2,461,500
000063. Biaya Pengiriman Surat Dinas	4,200,000	0	1,699,500	39,000	1,738,500	41.39 %	2,461,500
522111. Belanja Langganan Listrik	706,291,000	0	242,400,162	79,288,546	321,748,708	45.55 %	384,542,292
000064. Belanja Langganan Listrik	706,291,000	0	242,400,162	79,288,546	321,748,708	45.55 %	384,542,292
522112. Belanja Langganan Telepon	6,000,000	0	1,321,800	330,450	1,652,250	27.54 %	4,347,750
000065. Langganan Telephone	6,000,000	0	1,321,800	330,450	1,652,250	27.54 %	4,347,750
522113. Belanja Langganan Air	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
000066. Langganan Air	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522141. Belanja Sewa	26,000,000	0	25,976,000	0	25,976,000	99.91 %	24,000
000067. Langganan Web Hosting	26,000,000	0	25,976,000	0	25,976,000	99.91 %	24,000
002.0C Pemeliharaan Kantor	1,404,251,000	0	251,236,527	112,304,630	363,541,157	25.89 %	1,040,709,843
523111. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	905,993,000	0	161,637,360	63,845,000	225,482,360	24.89 %	680,510,640
000068. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	905,993,000	0	161,637,360	63,845,000	225,482,360	24.89 %	680,510,640
523119. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	42,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000	5.85 %	40,250,000
000069. Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit)	42,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000	5.85 %	40,250,000
523121. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	455,508,000	0	87,099,167	48,459,630	135,558,797	29.76 %	319,949,203
000070. Pemeliharaan Lift	57,000,000	0	49,950,000	0	49,950,000	87.63 %	7,050,000
000071. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	19,000,000	0	8,900,000	1,700,000	10,600,000	55.79 %	8,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Pejabat	19,000,000	0	8,900,000	1,700,000	10,600,000	55.79 %	8,400,000
000072. Pemeliharaan AC Cassete	83,076,000	0	11,310,000	28,300,000	39,610,000	47.68 %	43,466,000
000073. Pemeliharaan Laptop	15,257,000	0	600,000	0	600,000	4.26 %	14,607,000
000074. Pemeliharaan PC	29,820,000	0	1,850,000	1,833,520	3,683,520	12.35 %	26,136,480
000075. Pemeliharaan Printer	19,605,000	0	2,707,500	1,630,000	4,337,500	22.36 %	15,267,500
000076. Pemeliharaan AC Split	36,708,000	0	4,516,359	9,200,000	13,716,359	37.37 %	22,991,641
000077. Pemeliharaan Mesin Pompa	6,982,000	0	0	0	0	0.00 %	6,982,000
000078. Kendaraan Roda 2	13,300,000	0	1,434,550	4,561,400	5,995,950	45.08 %	7,304,050
000079. Kendaraan Roda 4	119,700,000	0	5,720,758	1,234,710	6,955,468	5.81 %	112,744,532
000108. Pemeliharaan barang elektronik lainnya	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000110. Pemeliharaan Peralatan Mesin	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
002.0D Operasional Lainnya	203,310,000	0	18,090,000	6,630,000	24,720,000	12.16 %	178,590,000
521111. Belanja Keperluan Perkantoran	123,750,000	0	0	0	0	0.00 %	123,750,000
000080. Pakaian Dinas Hakim 26 Org x 2 Stel	31,616,000	0	0	0	0	0.00 %	31,616,000
000081. Pakaian Dinas Pegawai 60 Org x 2 Stel	72,960,000	0	0	0	0	0.00 %	72,960,000
000082. Pakaian Dinas CPNS 4 Org x 2 Stel	5,798,000	0	0	0	0	0.00 %	5,798,000
000083. Pakaian Dinas PPPK 11 Org x 2 Stel	13,376,000	0	0	0	0	0.00 %	13,376,000
521115. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79,560,000	0	18,090,000	6,630,000	24,720,000	31.07 %	54,840,000
000084. Honor KPA	21,600,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	25.00 %	16,200,000
000085. Honor PPK	21,000,000	0	5,200,000	1,750,000	7,000,000	33.33 %	14,000,000
000086. Honor Penguji Tagihan Pemandatarangan SPM	9,000,000	0	2,250,000	750,000	3,000,000	33.33 %	6,000,000
000087. Honor Bendahara Penerimaan	2,400,000	0	600,000	200,000	800,000	33.33 %	1,600,000
000088. Honor Bendahara Pengeluaran	7,920,000	0	1,980,000	600,000	2,640,000	33.33 %	5,280,000
000089. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bln)	11,760,000	0	2,940,000	980,000	3,920,000	33.33 %	7,840,000
000090. Honor PPABP	5,880,000	0	1,470,000	490,000	1,960,000	33.33 %	3,920,000
002.0E HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	995,280,000	0	277,200,000	0	277,200,000	27.85 %	718,080,000
522141. Belanja Sewa	995,280,000	0	277,200,000	0	277,200,000	27.85 %	718,080,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000091. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (10 Orang x 12 Bln)	995.280,000	0	277.200,000	0	277.200,000	27.85 %	718.080,000
002.0G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	31.850,000	0	5.190,000	2.400,319	7.050,319	24.02 %	24.199,681
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.100,000	0	3.240,000	2.400,319	5.700,319	22.71 %	19.399,681
000092. Transportasi (2 org x 1 kegiatan)	1.800,000	0	0	0	0	0.00 %	1.800,000
000093. Uang Harta (3 org x 3 hari x 1 kegiatan)	4.950,000	0	390,000	390,000	780,000	15.76 %	4.170,000
000094. Tiket (2 org x 2 hari x 2 kegiatan)	11.000,000	0	0	0	0	0.00 %	11.000,000
000095. Penginapan (7 org x 1 hari x 1 kegiatan)	7.350,000	0	2.850,000	2.070,319	4.920,319	66.94 %	2.429,681
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750,000	0	1.950,000	0	1.950,000	28.89 %	4.800,000
000096. Perjalanan Dinas Dalam Kota (3 Org x 5 keg) termasuk Konsultasi ke KPPNKANWIL DJPbKPNLKNLKNWIL DJKNBKNBKO	6.750,000	0	1.950,000	0	1.950,000	28.89 %	4.800,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	136,000	15,000	151,000	50.33 %	149,000
EBD.225 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	136,000	15,000	151,000	50.33 %	149,000
005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	300,000	0	136,000	15,000	151,000	50.33 %	149,000
005.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	136,000	15,000	151,000	50.33 %	149,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	136,000	15,000	151,000	50.33 %	149,000
000098. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	136,000	15,000	151,000	50.33 %	149,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	70,602,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	13.60 %	61,002,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	70,602,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	13.60 %	61,002,000
BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	70,602,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	13.60 %	61,002,000
AEA Koordinasi	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
000 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
005.0A Pelaksanaan Pengamanan Sidang	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
021211 Belanja Bahan	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x25 kali)	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	196,000	0	0	0	0	0.00 %	196,000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	196,000	0	0	0	0	0.00 %	196,000
000 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	196,000	0	0	0	0	0.00 %	196,000
005.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	196,000	0	0	0	0	0.00 %	196,000
021114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000	0	0	0	0	0.00 %	18,000
000002. Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	18,000	0	0	0	0	0.00 %	18,000
021211 Belanja Bahan	178,000	0	0	0	0	0.00 %	178,000
000003. Penggandaan dan Pengiklan Berkas Perkara	78,000	0	0	0	0	0.00 %	78,000
000004. Alat Tulis Kantor	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
OBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,216,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	28.90 %	23,616,000
OBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33,216,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	28.90 %	23,616,000
000 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	33,216,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	28.90 %	23,616,000
005.0A Pos Bantuan Hukum	33,216,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	28.90 %	23,616,000
021211 Belanja Bahan	4,416,000	0	0	0	0	0.00 %	4,416,000
000005. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4,416,000	0	0	0	0	0.00 %	4,416,000
022131 Belanja Jasa Konsultansi	28,800,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	33.33 %	19,200,000
000006. Jasa Layanan Konsultansi Hukum	28,800,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	33.33 %	19,200,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Mei 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode ini	s.d. Periode	%	
QCA Perkara Hukum Perseorangan	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
000 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
005.0A Sidang di luar Gedung Pengadilan	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
022191 Belanja Jasa Lainnya	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000007. Biaya Uang Kebersihan (3 Orang x 1 Kali)	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
024111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,390,000	0	0	0	0	0.00 %	17,390,000
000008. Transportasi 7 Org x 1 Keg	2,100,000	0	0	0	0	0.00 %	2,100,000
000009. Tiket 7 Org x 1 Keg	4,836,000	0	0	0	0	0.00 %	4,836,000
000010. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (7 Orang x 1 Malam x 1 Keg)	6,944,000	0	0	0	0	0.00 %	6,944,000
000011. Uang Harian (7 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan)	3,710,000	0	0	0	0	0.00 %	3,710,000



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Mei 2026 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan Dalam arahnya pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada kode etik dan peraturan yang berlaku. Seluruh aparatur diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kode Etik Kepaniteraan, serta Kode Etik ASN. Selain itu, Ketua juga menguraikan kembali sejumlah regulasi penting, di antaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, sebagai pedoman dalam menjaga disiplin, pengawasan, serta penanganan pengaduan di lingkungan peradilan.
- Berdasarkan pada hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa terdapat 2 (dua) orang ASN yang tidak disiplin hadir tanpa ada eviden pendukung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada seluruh peserta rapat untuk selalu disiplin dan apabila ada keperluan mendesak seperti pulang cepat, datang terlambat, dll silahkan mengisi form yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan. Ketua mengatakan dengan tegas bahwa instruksi ini selalu disampaikan disetiap kesempatan namun pelanggaran disiplin masih terjadi, oleh karena itu, hari ini adalah pemberitahuan terakhir dan diharapkan tindakan indisipliner seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari serta dihimbau kepada seluruh pimpinan untuk selalu membina anak buahnya.
- Selanjutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan sosialisasi terkait Pengelolaan Kepentingan dan Budaya Anti Korupsi kepada seluruh peserta rapat yang mengatakan bahwa setiap tindakan korupsi pasti mengandung konflik kepentingan, namun tidak semua konflik kepentingan



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

merupakan korupsi, oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang tepat melalui prinsip 3 D yaitu Deklarsi, Diskusikan, dan Dimitigasi.

- Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan beberapa poin laporan kegiatan yang dilakukan selama bulan Mei 2026, yaitu :
 - Kepaniteraan telah melakukan rapat koordinasi pada bulan Mei yang pada pokoknya yaitu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *e-court*, SIPP, MISS.
 - Daftar Inventarisir Masalah yang diminta telah dilaksanakan dan dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.
- Plt. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan beberapa poin laporan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan selama bulan Mei 2026, yaitu :
 - Penyerapan anggaran DIPA 05 adalah sebesar 13.60% dan DIPA 01 sebesar 52.36%.
 - Plt. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga turut menyampaikan bahwa kesekretariatan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan hasil temuan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam waktu yang tidak terlalu lama.

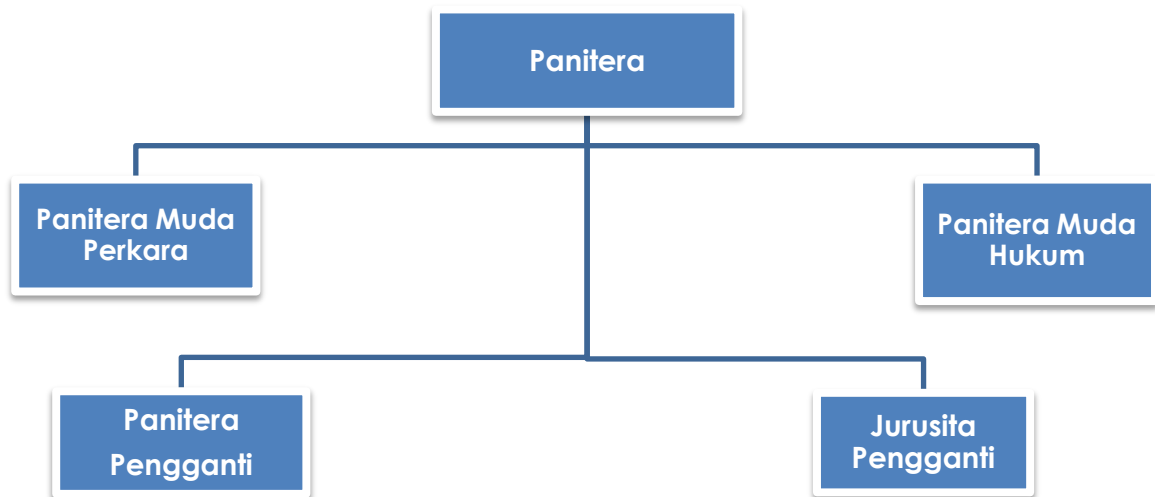
b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.



B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.



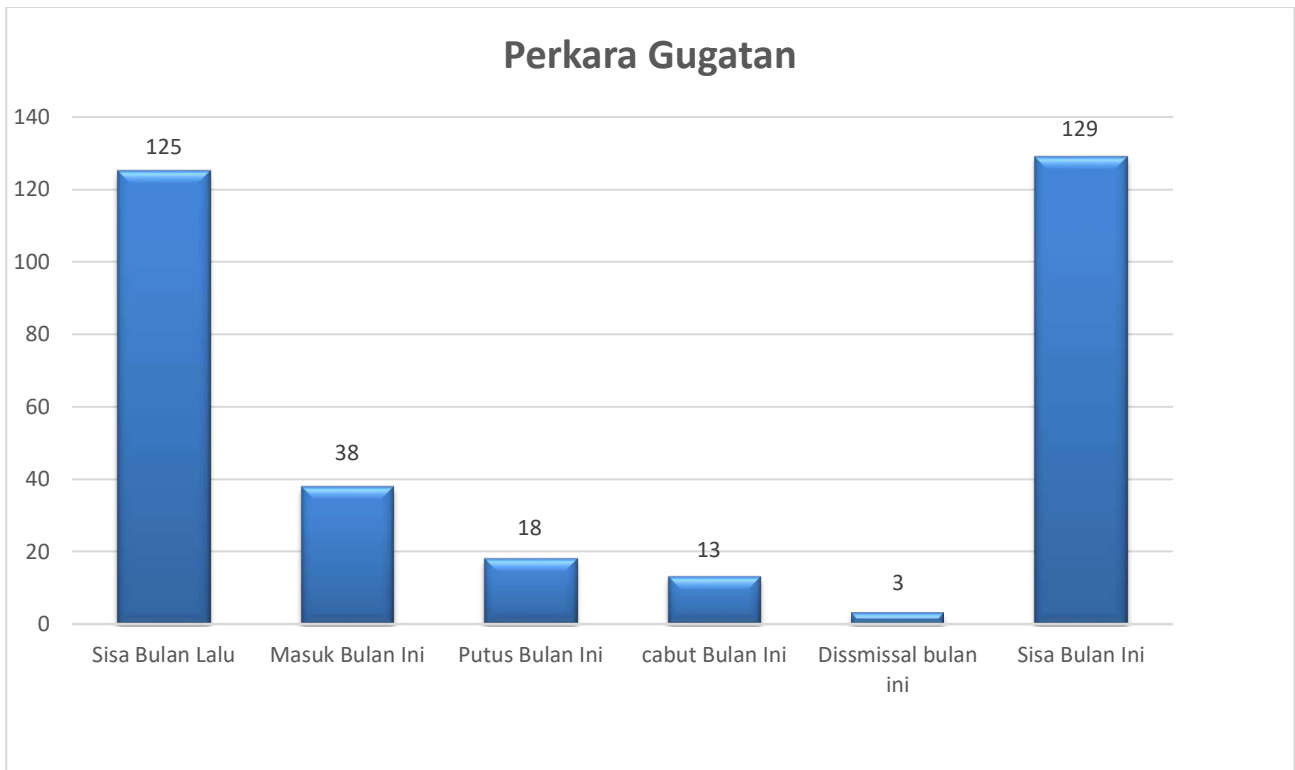
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2026.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2026



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Keadaan Perkara

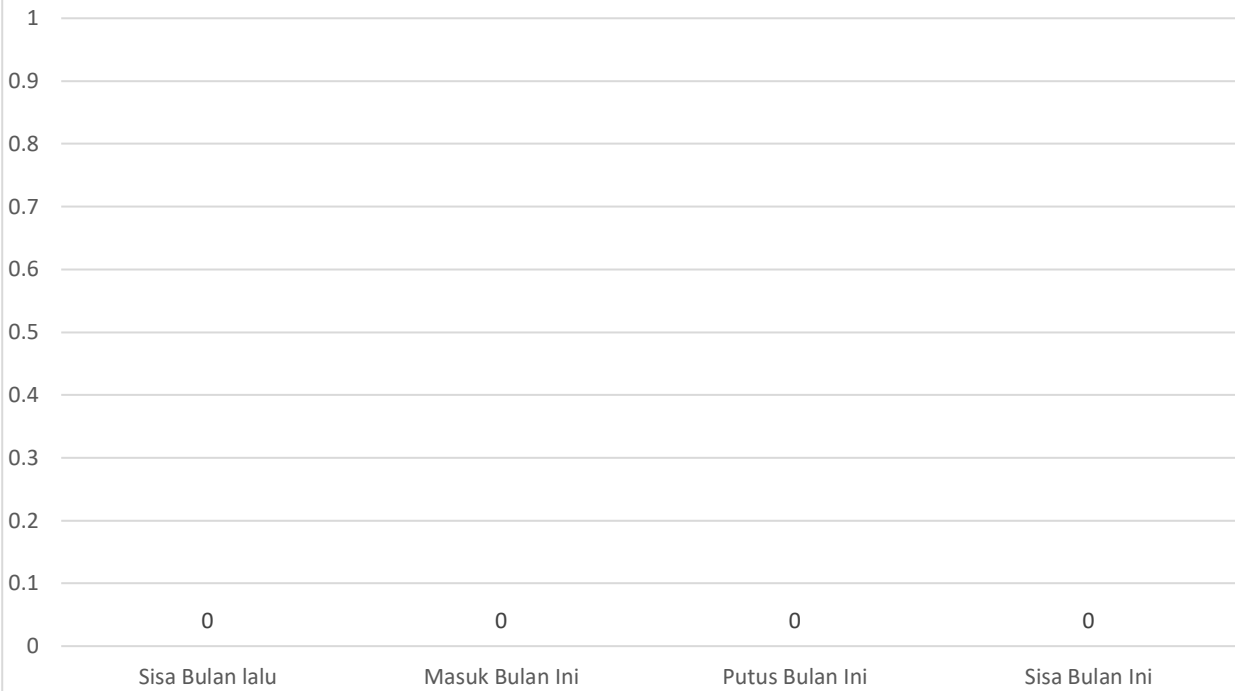


Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $13 + 3 + 18 = 34$ Perkara



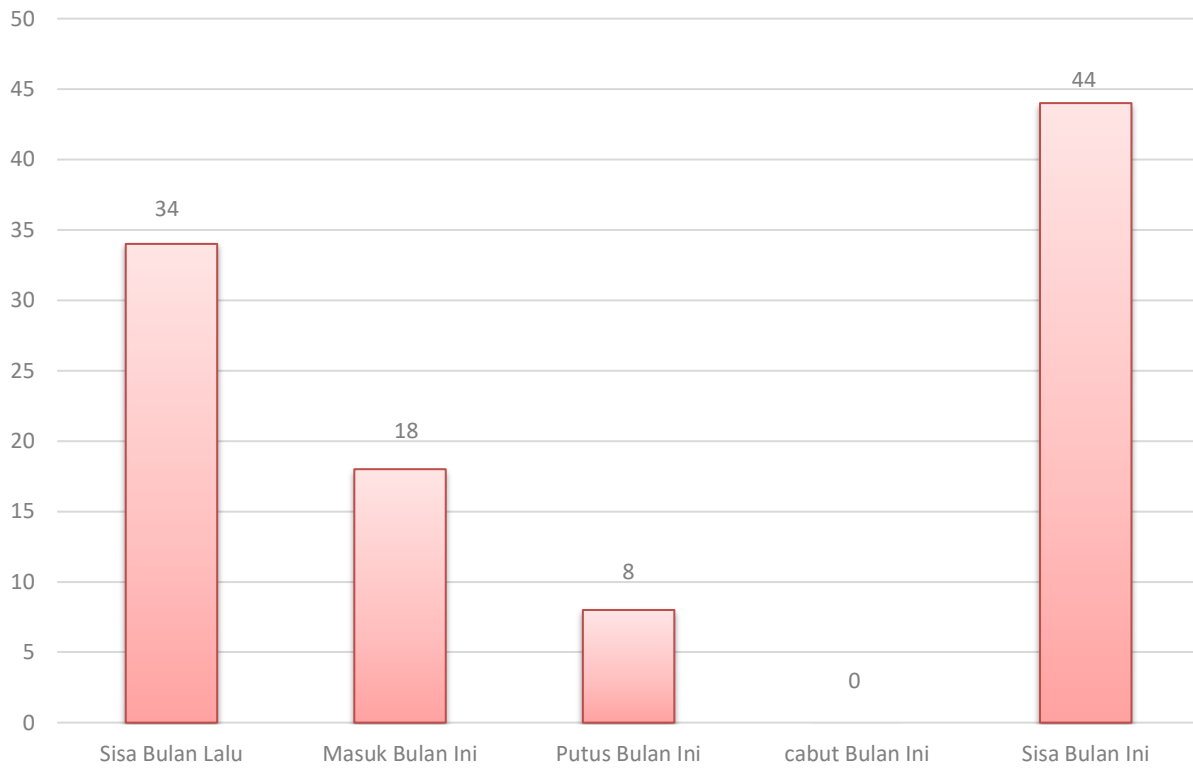
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

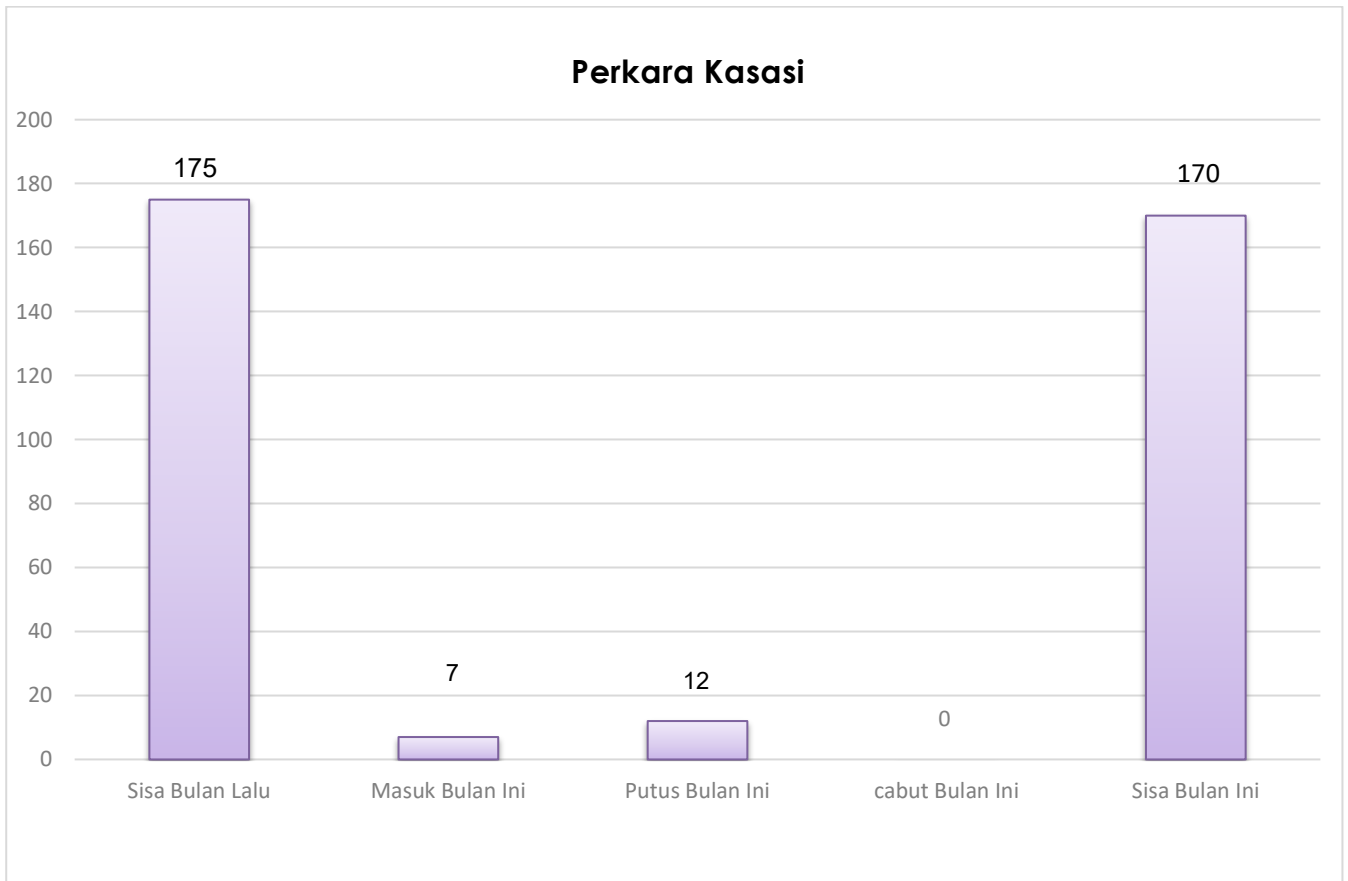


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Mei 2026



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN MEI TAHUN 2026

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara			Pengaduan			Perlawanan			Putusan						Permohonan			Tanpa Berkas		Keterangan					
			Masih	Selesai	Jumlah	Peringatan	Revisi	Putus	Perintah	Ditunda	Ditolak	Ditunda	Ditolak	Ditunda	Ditolak	Ditunda	Ditolak	Bandung	Kasasi	Keputusan	Bandung	Kasasi		Keputusan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A GUGATAN																												
1	Pertanahan	14	3	-	17	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	1	4	13	2	-	4	-	-	2	-	-	-
2	Kepegawaian	13	-	-	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	4	9	2	1	1	1	-	-	-	-	-
3	Perjinaan	8	10	3	15	1	9	10	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	12	4	1	6	1	2	2	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	3	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/ Parpol	20	2	-	22	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	19	3	2	-	-	3	2	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	15	7	-	22	4	3	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	20	1	2	2	1	2	1	6	-	-
17	Merek	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Lain Lain	46	15	3	58	11	4	10	5	2	-	-	-	2	-	6	-	10	48	5	-	1	-	1	5	1	-	-
JUMLAH		125	38	6	157	22	16	28	10	3	-	-	-	7	3	13	2	28	129	18	7	14	3	8	12	7	-	-

MENGETAHUI



Jakarta, 29 Mei 2026
PANITERA,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
Nip. 197310122000031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Mei 2026



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950, Telp.(021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN MEI TAHUN 2026

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 29 Mei 2026



Halaman 23 dari 27 halaman
Laporan Bulanan Bulan Mei 2026 PTUN JAKARTA
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pel...



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

1. Jakarta,— Dalam rangka memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19–20 Mei 2026.

Hari Pertama Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan terhadap beberapa aspek penting, meliputi:

- Unit Pengendalian Gratifikasi
- Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Berkas-berkas Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PTUN Jakarta, Bapak H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si., bersama tim yang terdiri dari:

- Bapak Esau Ngefak, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)
- Bapak Darul Napis, S.H. (Panitera Muda Perkara)
- Bapak Wahyu Suprpto, S.IP. (Kabag Umum & Keuangan)
- Muhammad Alifian Gerald Fauzi, S.H. (Analisis Perkara Peradilan)
- Vastina Baikul Khairat, S.T. (Teknisi Sarana & Prasarana)

Pelaksanaan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek administrasi dan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Hari Kedua Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua PTUN Jakarta. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan pelaksanaan Exit Meeting yang bertempat di PTUN Jakarta.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 73 PNS, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan April 2026 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk belanja PC All in One, Mesin Scanner, serta Mesin Printer.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Mengetahui



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



Jakarta, 09 Juni 2026

Plt Sekretaris,

Tias Descariasty, S.H.
NIP. 198412092006042002









Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaiki dengan rekonstruksi.
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekontruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Kompenen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekontrusi.
		

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					